



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PEMBENTUKAN REGULASI UNTUK TATA KELOLA WILAYAH IKN NUSANTARA

**Poedji Poerwanti**

Analisis Kebijakan Muda  
[poedji.purwanti@dpr.go.id](mailto:poedji.purwanti@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022. Pengesahan Undang-Undang ini menjadi momentum perbaikan tata kelola wilayah ibu kota untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Melalui UU IKN ini dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Pada Kamis 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022. Pemimpin Ibu Kota Nusantara ini bertanggung jawab terhadap pembangunan ibu kota negara berdasarkan UU IKN. Sehubungan dengan hal itu, dalam pelaksanaannya diperlukan regulasi sebagai turunan UU IKN.

Persiapan pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, diupayakan untuk terus dipercepat. Sejumlah peraturan turunan UU IKN saat ini sedang dirampungkan. Sudah disiapkan 4 (empat) rancangan peraturan presiden (Perpres) yaitu Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara; Perpres tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; Perpres tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, juga telah disiapkan 2 (dua) rancangan peraturan pemerintah (PP) yaitu PP tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan PP tentang Pendanaan dan Penganggaran Ibu Kota Nusantara.

Rancangan peraturan perundang-undangan ini merupakan amanat UU IKN yang keberadaannya diperkuat dalam ketentuan Pasal 43 UU IKN, bahwa peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak UU IKN diundangkan. Dengan demikian, peraturan turunan ini harus sudah terbentuk dalam batas waktu paling lama 15 April 2022.

Kerja cepat bertarget ini perlu dibarengi dengan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan peraturan turunan UU IKN, sehingga menjadi penting terhadap peraturan turunan UU IKN yang berupa rancangan PP dan rancangan Perpres tersebut, dilakukan melalui proses konsultasi publik yang benar-benar bersifat bermakna atau tidak sekedar formal.

Dalam proses penyusunan beberapa peraturan turunan UU IKN tersebut, masyarakat diundang untuk berpartisipasi aktif pada tanggal 22-23 Maret 2022 di Balikpapan. Publik juga diajak memberikan masukannya melalui [ikn.go.id/tentang-ikn](http://ikn.go.id/tentang-ikn). Dengan adanya konsultasi publik yang bersifat substantif diharapkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan benar-benar berkualitas dan konstitusional. Adapun penanggung jawab konsultasi publik ini ada di Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu. Kerja cepat persiapan pembangunan IKN membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi informasi data secara baik, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah, demi menghasilkan regulasi untuk tata kelola wilayah IKN Nusantara yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

## Atensi DPR

Salah satu fungsi DPR RI adalah pengawasan pelaksanaan undang-undang. Hal ini dilakukan antara lain dengan memantau peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang. DPR RI melalui Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri perlu mendukung Pemerintah dalam pembentukan peraturan pelaksanaan UU IKN dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di IKN Nusantara.

Langkah di atas dilakukan agar rancangan PP dan rancangan Perpres yang sudah disiapkan oleh Pemerintah segera diterbitkan menjadi PP dan Perpres untuk memberikan kedayagunaan dan kehasilgunaan. PP dan Perpres sebagai pelaksana UU IKN dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga UU IKN menjadi implementatif untuk menyelenggarakan tata kelola wilayah ibu kota negara.

## Sumber

*detik.com*, 21 Maret 2022

*Kompas*, 20 Maret 2022



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Dian Cahyaningrum  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.